

Rp76,6 Triliun Cukup Sampai Dua Putaran Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk Pemilu 2024 mendatang sebesar Rp76,6 triliun. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memastikan, anggaran itu cukup untuk dua putaran.

"Anggaran yang dianggarkan itu Rp76,6 triliun. Itu sudah termasuk Pilpres putaran kedua," kata Hasyim kepada wartawan, Minggu (24/9).

Anggaran tersebut telah disetujui Pemerintah, DPR hingga KPU.

"Itu sudah disetujui bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU. Demikian juga badan anggaran juga sudah menyetujui," ujarnya.

Namun demikian, untuk pencairan anggaran itu, menurutnya hal itu akan menunggu kepastian apakah Pilpres 2024 mendatang akan berjalan dua

putaran atau tidak. "Nah soal dicairkannya kapan itu kan tergantung, apakah syarat Pilpres putaran kedua terjadi atau enggak," katanya.

Perlu diketahui bahwa DPR dan pemerintah menyepakati mempercepat jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres - cawapres) 2024. Jadwal pendaftaran disepakati mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.

Keputusan ini disepakati dalam rapat konsultasi Peraturan KPU (PKPU) yang digelar Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (20/9/2023) malam. ● han

CSIS Prediksi 2 Poros Pilpres Sulit Terwujud, Begini Analisanya

JAKARTA (IM) - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi Pilpres 2024 cuma diikuti dua poros sulit terwujud. Bagaimana analisisnya?

"Wacana dua poros sampai saat ini sepertinya akan sulit terwujud, kenapa?" kata Arya dalam diskusi 'Update Politik Nasional: Pemilu 2024, Peta Kompetisi Partai, dan Situasi Keamanan di Papua' di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

Arya mengatakan wacana dua poros Pilpres, seperti yang disebut Waketum PKB Jazilul, akan membuat koalisi masing-masing pasangan calon menjadi sangat gemuk. Menurut Arya, hal itu akan membuat partai merasa rugi.

"Bila ini terjadi tentu kolalisinya akan gemuk sekali, dan tidak menguntungkan juga untuk partai, karena akan mengurangi portofolio kabinet," jelasnya.

Selain itu, kata dia, kolalisi di Pilpres saat ini sudah mulai semakin jelas sehingga perubahan koalisi kecil kemungkinan terjadi. Terlebih, dia mengatakan pendaftaran capres akan dilakukan dalam waktu dekat. "Terkait tiga poros koalisi, ini situasi yang paling mungkin terjadi saat ini. Karena dengan tiga poros ini tentu publik mempunyai alternatif pilihan," ujarnya.

Dia juga mengatakan peta Pileg 2024 akan berubah jika Pileg 2024 jadi dimajukan dari November menjadi September 2024. Arya mengatakan perubahan jadwal itu akan

membuat parpol mendorong sosok bakal calon kepala daerah maju dulu dalam Pileg.

"Rencana penerbitan Perppu yang mempercepat Pileg 2024, ini tentu akan mengubah peta pencalegan," kata Arya.

"Kalau sebelumnya para kepala daerah yang tidak maju caleg karena mereka harus mundur, dengan rencana penerbitan Perppu itu akan mengubah situasi pencalegan," tambahnya.

Menurutnya, parpol akan mendorong sosok bakal calon kepala daerah untuk maju di Pileg demi meningkatkan suara partai di masing-masing daerah. Dia mengatakan percepatan Pileg akan mengubah persaingan di internal partai.

"Di Pileg situasinya kalau ini terjadi Pileg dipercepat, kepala daerah maju, meskipun di awal kami melihat situasinya mulai stabil, yang berubah itu kompetisi di tengah partai secara agregat situasi partai sudah mulai stabil, meskipun tentu tidak akan besar sekali, yang berubah adalah kontestasi di tengah partai," jelas dia.

Dia mengatakan jika Pileg digelar November 2024, maka orang-orang yang hendak menjadi kepala daerah kemungkinan besar tak akan didorong oleh parpol menjadi caleg. Dia mengatakan hal itu disebabkan oleh pelantikan caleg terpilih sebagai anggota legislatif digelar Oktober 2024. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



UJI CALON HAKIM KONSTITUSI FIRDAUS DEWILMAR
Calon Hakim Konstitusi Firdaus Dewilmar melambatkan tangan usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/9). Selain Firdaus, ada tujuh orang lainnya yang menjalani uji calon Hakim Konstitusi, antara lain Renny Halida Ilham Malik, Elita Rahmi, Aidul Fitriyada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, dan Arsul Sani.

Jokowi Perintahkan Masalah Rempang Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Pemerintah sebut tidak ada pengusuran atau relokasi tempat tinggal warga Rempang. Pemerintah hanya menggeser permukiman warga.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar penyelesaian masalah Rempang dilakukan secara kekeluargaan. Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, setelah selesai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (25/9).

Ratas tersebut membahas soal penanganan situasi di Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan," ujar Bahlil.

"Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,"

katanya. Arahan kedua, Presiden Jokowi engaskan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan Rempang secara bersama-sama. Bahlil telah melaporkan bahwa dari 17.000 hektare area di Rempang, yang dapat dikelola oleh pemerintah sekitar 7.000-8.000 hektare saja. Sisa area yang tidak bisa dikelola akan dibiarkan sebagai hutan lindung. Pemerintah akan fokus pada 2.300 hektare lahan di tahap awal untuk pengembangan industri kaca dan solar panel.

Kemudian, arahan ketiga, Presiden Jokowi minta tidak ada pengusuran tempat tinggal masyarakat di Rempang. Sebab itu, pemerintah hanya menggeser permukiman warga. Hal itu, menurut Bahlil, sudah disepakati dengan tokoh-tokoh masyarakat saat dia berkunjung ke Rempang beberapa hari lalu.

"Saya datang sendiri di Rempang selama dua hari dan menemui masyarakat di sana. Kami telah melakukan solusi, posisi rempang itu bukan pengusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran," ucap Bahlil.

"Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke (Pulau) Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," katanya.

Selain itu, masyarakat Rempang akan diberi penghargaan terhadap status lahan mereka.

Penghargaan yang dimaksud berupa sertifikat hak milik untuk lahan seluas 500 meter persegi. Kemudian, masyarakat akan diberikan rumah tipe 45.

"Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga Rp 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai, nilainya berapa, itu yang akan diberikan," kata Bahlil.

Selain itu, sambil menanti rumah yang dibangun jadi, nantinya masyarakat diberikan uang tunggu sebesar Rp

1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp 1,2 juta per keluarga.

"Jadi kalau satu keluarga ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp 4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta. Kurang lebih sekitar 6 juta rupiah cara perhitungannya," kata Bahlil. "Kemudian dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba itu juga akan dihentikan dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam)," katanya.

Adapun ratas yang membahas soal Rempang kali ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dan Kepala BP Batam M Rudi.

Persoalan Rempang menjadi sorotan publik setelah terjadi bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada 7 September 2023. Bentrokan

ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Hingga akhirnya, aparat kepolisian menembakkan gas air mata.

Baru-baru ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan kuat terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam serangkaian peristiwa bentrok penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, indikasi tersebut kini masih dialami oleh Komnas HAM untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran HAM atau tidak. ● han

PDI-P Anggap Kaesang Gabung ke PSI Hanya Riak-riak Kecil

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan, partainya tetap berjalan dan tidak terganggu dengan adanya berita putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Said menganggap hal tersebut layaknya riak kecil yang tak perlu dipersoalkan.

"Aktivitas PDI Perjuangan tetap berjalan melaju berkhidmat dan mengabdikan pada negeri ini tanpa terganggu serta tidak terpengaruh gonjangan ombak sebesar apa pun, apalagi jika hanya sekadar riak kecil," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (25/9).

Said menceritakan bahwa beberapa kader PDI-P juga pernah memilih jalan berbeda

dengan berpindah ke partai politik (parpol) lain. Padahal, menurut dia, mantan kader-kader itu sempat menduduki jabatan strategis sebagai menteri hingga anggota DPR. Hanya saja Said tak menyebut siapa saja mantan kader PDI-P yang dimaksud.

"PDI Perjuangan tetap teguh melaju tanpa terganggu sedikit pun," katanya. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menilai, PDI-P terlalu besar untuk terisik hanya oleh satu atau orang-orang. Apalagi, kata dia, orang-orang tersebut bukanlah menjadi pengurus inti di partai.

"Jika seorang pengurus sekalipun keluar masih ada puluhan, ratusan, ribuan dan bahkan jutaan yang siap menggantikan," ucap Said.

Dia berpandangan, PDI-P juga telah menjelma menjadi partai modern meski memiliki sistem partai yang baku. Namun, Said meyakini hal itu tidak membuat PDI-P terganggu oleh keluar masuknya anggota atau kader.

"Apalagi yang sama sekali berada di luar manajemen partai. Insya Allah," katanya.

Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9). Peresmian ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis kartu tanda anggota (KTA) di Kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Kartu itu diserahkan Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaesang Pangarep. Isteri Kaesang, Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan

Pembina PSI, Grace Natalie dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni tampak hadir dalam acara itu.

Disitimewakan

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menjadi magnet sendiri bagi PSI. Sehingga, partai itu sampai memberikan keistimewaan "jemput bola", setelah memutuskan untuk bergabung.

"Karena Kaesang anak presiden. Kalau bukan anak Presiden, rasa-rasanya PSI biasa saja," kata Adi saat dihubungi wartawan, Senin (25/9).

Jemput bola yang dimaksud yakni pengurus inti DPP PSI bertandang ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber,

Banjarsari, Surakarta pada akhir pekan lalu. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan tokoh lain yang bergabung ke PSI.

Mantan Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang atau eks keyboardist Nidji, Doadibadai Holo, misalnya, haas bertandang ke DPP PSI. Hal yang sama berlaku ketika PSI menerima Helmy Yahya, Irma Hutabarat, dan Ade Armando bergabung.

Sementara ketika Kaesang memutuskan bergabung, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, secara langsung memberikannya kartu tanda anggota (KTA) kepadanya.

"Kalau Kaesang anak orang biasa, PSI tak akan terlihat seperti itu," imbuh Adi. ● han



FOTO: ANTARA

PEMERIKSAAN SAKSI TPPU LUKAS ENEMBE
Karina Pratiwi Putri berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/9). Dokter gigi yang juga menjabat sebagai Direktur PT Sejahtera Valasindo Karina Pratiwi Putri diperiksa sebagai saksi serta menyerahkan dokumen penukaran mata uang valas dalam kasus dugaan TPPU Lukas Enembe

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE

Bahwa perjanjian pembiayaan :

No.	Brand, Type, Color & Year	Tax	Transmission	Police Number
1	NISSAN X-TRAIL 2.0 CVT (4X2) ABU ABU TUA METALIK 2009	12/02/2024	A/T	B 1267 TFI
2	TOYOTA NEW AVANZA 1.3G PUTHI 2015	08/07/2020	A/T	B 1948 VKF
3	TOYOTA W101RE - LBVFJ 1.5 Q CVT TSS VELOS HITAM METALIK 2022	19/08/2023	A/T	D 1056 AJZ
4	SUZUKI RS415 SWIFT ST 4x2 PUTHI METALIK 2011	10/10/2023	M/T	AB 1989 Y
5	NISSAN LIVINA-XGEAR 1.5 4X2 PUTHI 2012	08/02/2024	A/T	D 1681 JL
6	SUZUKI SPLASH DR412 (4x2) MERAH 2013	19/08/2022	M/T	B 1453 TRN
7	KIA PICANTO SE 1.2 MERAH METALIK 2012	21/06/2023	M/T	D 1618 QG
8	NISSAN GRAND LIVINA XV PUTHI 2011	25/10/2023	A/T	D 1202 VT
9	SUZUKI A1J310F GL (4x2) (KARIMUN WAGON R) ABU ABU METALIK 2017	01/03/2024	M/T	AD 1370 VS
10	DAIHATSU GRAN MAX S401RV-ZMDEJJ HJ SILVER METALIK 2011	09/04/2022	M/T	B 1217 TKZ
11	DAIHATSU XENIA F650RV-GMRFJ (4X2) PUTHI 2014	21/05/2023	M/T	B 1613 TMT
12	DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZJF 1.2 R SILVER METALIK 2017	26/09/2023	M/T	F 1372 AO
13	DAIHATSU AYLA B100RS-GMOFJ 4X2 BIRU MUDA METALIK 2014	24/05/2024	M/T	D 1404 VZC

telah cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 04 Oktober 2023. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual dan di perhitungkan kembali.

Hormat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670



FOTO: ANTARA

SIMULASI PEMILU 2024 DI TEGAL

Personel kepolisian membubarkan pengunjuk rasa saat simulasi pengamanan pemilu 2024 di Polres Tegal Kota, Jawa Tengah, Senin (25/9). Simulasi sistem pengamanan kota (sispamkot) tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel polisi pada pengamanan Pemilu 2024.

INFORMASI RELOKASI KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 30 Oktober 2023 akan dilakukan relokasi layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Balikpapan	
Alamat Kantor Lama	Alamat Kantor Baru
Jalan Jend. Sudirman No. 23 Balikpapan, Kalimantan Timur 76114	Jalan Jend A. Yani No. 35, Karang Jati, Balikpapan 76121

Terkait dengan relokasi layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Cabang Balikpapan (0542) 427779 (Hunting)

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin